

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kegiatan masyarakat, Bangsa dan Negara. Pembangunan adalah suatu proses kegiatan pengembangan kegiatan untuk mengadakan perubahan kearah keadaan yang lebih baik, dan pembangunan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Demi tercapainya pembangunan Nasional, maka penyusun program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang ditentukandalam pemerintah Indonesia (Pancasila dan UUD 1945).

Dalam peningkatan pemerataan pembangunan disegala bidang serta peningkatan sumber daya manusia yang juga subjek pergerakan pemerataan, sangat dibutuhkan kehandalan, keterampilan profesionalisme dalam meningkatkan mutu, selain itu yang paling penting faktor keuangan karena faktor keuangan dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahanya.

Demikian juga kebijakan mengenai anggaran akan membantu pemerintah daerah dalam mengontrol masalah keuangan keuangan daerah dan juga sebagai alat untuk mempegaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan juga mendukung Pendapatan Asli Daerah sendiri. Sehingga tujuan akhir

pemnfataan Pendapatan Asli Daerah untuk kepentingan Penyelenggara Pemerintah Daerah agar pembangunan ekonomi dapat tercapai.

Kota Mojokerto yang merupakan bagian dari Propinsi Jawa Timur yang sedang berkembang, Sama seperti Daerah-Daerah yang lain, Kota Mojokerto tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor, yang besumber dari pemerintah daerah Kota Mojokerto sendiri.

Kota Mojokerto merupakan salah satu kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun Provinsi. Penyerapan anggaran tahun 2016 menembus angka 91% dari APBD sebesar Rp 1,007 triliun. Naik dibandingkan tahun 2015 sebesar 85%. Tahun 2017 dengan APBD yang turun 10% menjadi Rp 915 miliar. Wali Kota Mojokerto berharap serapan anggaran tahun 2017 bisa sampai 95%. Data yang dihimpun, realisasi penyerapan APBD 2016, dari 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum maksimal.

Dalam rincian realisasi penyerapan anggaran yang dikeluarkan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto sempat menyebutkan, minimnya pelaksanaan kegiatan ini membuat dana teralokasi gagal terserap. Kepala BPPKA Kota Mojokerto, Agung Moeljono menegaskan bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dicairkan mulai 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi

anggaran mencapai 91,7%. Untuk itu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto diharapkan agar memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, dimana konsep pengelolaan ini berdasarkan pada tiga elemen utama yang terdapat di dalamnya yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Analisis kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto merupakan proses penilaian mengenai tingkat kemajuan dalam pencapaian suatu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPPKA Kota Mojokerto dalam bidang keuangan

Tabel 1.1. Pendapatan Daerah

No	Tahun	Pendapatan Daerah
1	2015	717.544.079.472
2	2016	806.772.000.000
3	2017	782.331.260.000
4	2018	887.592.875.418
5	2019	885.966.038.008

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pendapatan daerah Kota Mojokerto mengalami naik turun pada Pendapatan Daerahnya Tepatnya Ditahun 2017 dan 2019 Pendapatan Kota Mojokerto mengalami Penurunan data tersebut didapatkan dari BPPKA kota mojokerto.

Pemerintah tentunya akan melakukan adjust pemotong sesuai kapasitas daerah masing-masing dan secara hati-hati sesuai situasi dan kondisi daerah ada yang punya fiskal baik maupun yang kecil. Maka dari itu pemerintah daerah memiliki kewenangan serta kewajiban dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri dalam mengurangi tingkat

ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, salah satunya yaitu memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, ada beberapa macam sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-undang No.23 pasal 285 Tahun 2014. Setiap pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dituntut untuk lebih bekerja keras dalam mencapai kemandirian setiap daerah dalam berbagai hal dan usaha yang dilakukan, serta harus mengarah kepada penyelenggaraan pemerintah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sumber-sumber Pendapatan Daerah salah satunya yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Penerimaan yang sah. Pemerintah juga perlu memaksimalkan hasil Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah dapat diandalkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan harus digali secara maksimal dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 157, Adapun sumber Pendapatan maupun penerimaan Daerah yaitu terdiri dari Pendapatan

Asli Daerah. PAD yang dimaksud memiliki 4 Unsur yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dimiliki Daerah dan PAD lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam konsep otonomi daerah keuangan daerah adalah pendapatan suatu daerah yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga daerah tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintah memberikan wewenang yang luas bagi pemerintah daerah untuk menggali dan memperluas dana PAD secara maksimal dan profesional untuk melaksanakan otonomi daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan biaya yang lumayan sangat besar, salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Agar lancar menjalankan otonomi daerah maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengimpletasikan regional otonomi, pemerintah harus mengidentifikasi sektor potensial sebagai pendorong untuk pengembangan daerah, terutama melalui pengembangan potensi pendapatan yang dihasilkan secara lokal (PAD).

Di era otonomi daerah saat ini, Pendapatan Asli Daerah dan Dana transfer pemerintah sebagai salah satu sumber penerimaan negara sangat penting. Sejalan dengan otonomi daerah keseimbangan keuangan pusat dan

daerah merupakan elemen penting yang harus dilakukan dalam kaitanya dengan impletasi otonomi daerah. Oleh karena itu otonomi daerah dalam mengelola keuangan daerah semakin berperan sangat besar dan penting, (penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Maka dari itu proses pembelajaran sangat perlu dilakukan untuk setiap daerah dan mengubah tantangan menjadi peluang demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat daerah masing-masing. Dalam menangani urusan pemerintah dan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi, tentunya pemerintah memiliki kewajiban dan wewenang yang benar-benar sesuai dengan yang dianjurkan oleh otonomi daerah. Otonomi daerah diharapkan mampu menjadi jawaban untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang tidak merata atau setidaknya dapat meminimalisir tingkat ketimpangan yang terjadi. Otonomi daerah disatu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun disisi lain memberkan implikasi tanggung jawab yang besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu peneliti juga ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto dan ingin mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan mengukur laju pertumbuhan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap PAD. Berdasarkan latar belakang peneliti mengambil judul yang bertema **Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli**

Daerah dan Pendapatan Transfer serta Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah Kota Mojokero.

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan dari penjelasan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto?
2. Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Kota Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingi dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah Kota Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahhan informasi dan bahan evaluasi tentang kebijakan keuangan daerah terutama adalah usaha peningkatan kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Mojokerto.

1.4.2 Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan dan mempraktikkan ilmu dan teori, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah(PAD)

1.4.3 Bagi penulisan selanjutnya

Dapat dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan.